

Konstruksi Politik Perempuan dalam Proses Pembentukan Pararem Desa Pakraman Megati Kelod

Agus Adi Sentana Putra¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, A. A. Sg. Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: gusadisentana@gmail.com¹, erviantono2@unud.ac.id², mahaswari@unud.ac.id³

ABSTRACT

This study examines traditional Balinese women who cannot be separated from gender construction which politically positions them as a group that is always dominated by patriarchal structures. So this research was carried out to then see how the culture of placing them as patriarchal when indigenous women were given space in making decisions or policies at the customary level, especially in this case the pararem in Desa Pakraman Megati Kelod, Tabanan Regency, to get an actual picture of the political construction of indigenous women in the process of forming pararem policies within an institutional structure. This study uses a type of qualitative method with the approach taken in this study, namely case study research. The findings show that the role of women in the Pakraman Megati Kelod Village in the process of forming pararem is still very suboptimal. Several factors hindered the role of women in the pararem formation process, such as unsupportive social conditions, lack of courage in expressing their voices in forums and the extent to which their capacities were controlled. These factors then prevent women from contributing further in the public sphere such as Paruman.

Keywords: *Balinese Women, Patriarchy, Feminist Intersectionality, Pararem.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini hendak melihat fenomena gender yang mulai menjadi pembicaraan dalam berbagai aspek baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya maupun politik. Terlebih lagi mulai banyak

pembahasan serius terhadap kesetaraan hak perempuan yang mulai dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan publik terutama didalam area-area partisipasi politik. Perempuan adat dalam aktivitasnya selalu dikonstruksikan dalam tugas-tugasnya yang sangat padat. Hal ini terkait dari proses ritual serta tugas-tugas terkait menghabiskan

sebagian besar waktu dan energinya di dalam menjalankan aktivitas keseharian sebagai ibu rumah tangga. Hanya saja saat berhadapan dengan sektor adat, keberadaan perempuan Bali termasuk didalamnya ibu rumah tangga selalu terdominasi oleh struktur patriarki. Posisi ini membuat perempuan sangat lemah secara struktural, hal ini tentunya juga tidak terlepas dari konstruksi gender yang secara politis mendudukan mereka sebagai kelompok yang secara senantiasa terdominasi. Budaya patriarki sangat dekat dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran mendasar masyarakat dengan doktrin-doktrin yang masuk secara universal, seperti dominasi laki-laki atas aktivitas perempuan termasuk partisipasi-partisipasi yang sifatnya hanya kosmetikal atau tidak substantif. Doktrin yang dikonstruksi terlihat sebagai kodrat sosial yang ada di tengah masyarakat, kemudian ini diperkuat oleh doktrin kepercayaan atau agama yang diharuskan untuk lebih mendewakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang memiliki persamaan derajat sebagai makhluk ciptaan tuhan. Tentu ini menjadi persoalan yang kontradiktif terhadap konstruksi budaya patriarki di mana seperti yang disampaikan oleh Holleman dan Koentjaraningrat bahwa kebudayaan Bali sangat dekat dengan sistem kekerabatan patrilineal. Ini menjadi sebuah persoalan yang jika melihat kebenaran dalam pandangan Agama Hindu sebagai ajaran yang sangat memuliakan perempuan, di mana perempuan diartikan sebagai "sakti" (memiliki kekuatan) terhadap laki-laki.

Realitasnya dalam beberapa kasus yang terjadi akibat dari budaya patriarki ini memunculkan berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan seperti, beban tanggung jawab, pembagian jam kerja baik di sektor publik maupun privat. Melihat dari realitas bisa dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan di ruang publik dianggap tidak memiliki nilai tawar diakibatkan dari sebuah budaya patriarki dan dalam kelembagaan yang tidak ramah akan gender. Sehubungan dengan fenomena tersebut penulis tertarik mengangkat topik terkait konstruksi politik perempuan dalam proses pembentukan kebijakan di level adat dalam hal ini *pararem* di desa pakraman Megati Kelod.

Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi perempuan adat dalam proses pembentukan kebijakan *pararem* Desa Pakraman Megati Kelod Kabupaten Tabanan?.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi politik perempuan dalam proses pembentukan *pararem* dalam sebuah struktur kelembagaan Desa Pakraman Megati Kelod Kabupaten Tabanan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam menganalisa konstruksi perempuan adat dalam proses pembentukan kebijakan *pararem* di Desa Megati Kelod Kabupaten Tabanan, penulis mengkaji penelitian-

penelitian terkait sebelumnya, yakni pertama dalam disertasi I Komang Wiasa tahun 2004. Dimana pada penelitian ini ingin melihat dan menganalisis terkait kebijakan awig-awig baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat adat (krama). Fokus dalam penelitian ini terkait peran perempuan dipandang dari sudut pemerintahan adat di Bali. Ditinjau dengan perspektif Agama Hindu, adat istiadat, modern, dan perempuan dalam realitas sehari-hari. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini melihat bahwa, (1) Sebagian besar masyarakat setuju tidak bertentangan dengan ajaran Agama Hindu, (2) Peran perempuan dalam adat istiadat menghasilkan data yang masih pro dan kontra yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap adat istiadat, (3) Sebagian besar perempuan masih belum dapat menerima peran perempuan terhadap pandangan serta konsep modern tentang peranan perempuan di desa adat, (4) Pandangan perempuan yang masih perlu mendapatkan perhatian dari pihak perangkat desa terhadap peran perempuan di dalam desa adat, (5) Peranan sehari-hari yang dilakukan oleh perempuan jauh lebih besar perannya dibandingkan dengan laki-laki terutama pada kegiatan desa adat seperti upacara agama maupun adat. Pada penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Ni Made Ras Amanda Gelgel tahun 2016. Dimana dalam penelitian ini melihat peran perempuan dalam ranah politik dan sosial seringkali dipandang sebelah mata. Sistem patriarki yang dianut

masyarakat di Bali, seringkali menjadikan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Secara realitas perempuan sangat berperan tidak hanya di ranah privat, namun juga di ranah publik. Posisi perempuan yang lebih inferior di adat di Bali menyebabkan seringkali perempuan bekerja harus dengan seijin suami atau keluarga. Dalam penelitian ini perempuan di Gianyar memandang peranannya di ranah publik dan privat yang masih lebih rendah dibandingkan peranan laki-laki khususnya di ranah publik. Akar permasalahan dari ketimpangan ini salah satunya adalah budaya patriarki, di mana sistem masih didominasi oleh laki-laki. Akhirnya persepsi perempuan pada ranah privat yaitu cenderung menerima beban dan perannya sebagai kodrat walaupun kadang mereka merasakan beban yang besar dalam menjalankannya. Perempuan di Gianyar cenderung tidak memiliki pengetahuan mengenai peranannya dan terbiasa melakukan perannya sebagai rutinitas dan tidak berdaya untuk membongkar rutinitas yang mereka jalani. Ketiga, pada jurnal yang ditulis oleh Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati 2014. Dimana dalam penelitian ini melihat kebudayaan Bali yang terbelenggu dengan kebudayaan patriarki yang berawal dari sistem kekerabatan Bali yang berbentuk patrilineal. Hal ini menggambarkan bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Mengakibatkan ketimpangan atau kesenjangan terhadap hak

dan kewajiban terhadap kaum perempuan serta salah satu indikator penyebab terjadinya kesenjangan gender yang dialami oleh kaum perempuan Bali. Kesenjangan gender yang terjadi ini pada dasarnya menggambarkan status, kedudukan, dan kualitas penduduk perempuan yang masih lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan Bali menjadi kajian utama dalam permasalahan gender ini karena adat dan tradisi Bali sangat membelenggu kaum perempuan. Hasil temuan dalam penelitian ini mengenai persepsi perempuan Bali terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam budaya Bali yaitu kesetaraan dan keadilan gender dimaknai berbeda oleh tiap subjek. Subjek 1 menganggap budaya patriarki Bali adalah setara dan adil secara gender, sedangkan Subjek 2 dan 3 menyatakan budaya patriarki Bali tidaklah setara dan adil secara gender. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh terselesaikan atau tidaknya permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing subjek akibat budaya patriarki Bali.

Feminis Intersectionality

Dalam penelitian ini akan mengadaptasi teori *Feminism Intersectionality* yang dimana *feminism Intersectionality* merupakan teori yang mengadaptasi dari teori feminis modern. Pada tahun 1989 Kimberle Williams Crenshaw, dalam tulisan yang berjudul "*Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*" di mana Crenshaw

memperkenalkan istilah "*Intersectionality*" ke dalam leksikon teori kritis. Pada awalnya perluasan dan penerapan pendekatan *intersectional* terhadap isu-isu seperti kelas sosial, orientasi seksual, usia, dan warna kulit, menciptakan "hegemoni kategoris" seperti kelas sosial dan jenis kelamin yang diistimewakan. Teori ini memperlihatkan bahwa berbagai kategori sosial, biologis, dan budaya seperti gender, ras, kelas, dan lainnya terkait identitas yang saling berinteraksi memberikan dampak terhadap ketidakadilan yang sistematis. *Intersectionality* menyatakan bahwa konseptualisasi klasik penindasan dalam masyarakat seperti seksisme, rasisme kefanatikan terhadap kepercayaan, yang di mana bentuk-bentuk penindasan tersebut saling berhubungan, sehingga menciptakan sistem penindasan yang mencerminkan berbagai bentuk diskriminasi. Maka dalam penelitian ini penulis ingin melihat konstruksi perempuan adat dalam proses pembentukan kebijakan di level adat dalam halnya *pararem*. Dimana perempuan yang selama ini selalu menunjukkan peranan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara otonom namun pada realitasnya perempuan bertemu dengan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh struktur yang menekan dan perempuan tidak memiliki power untuk mendobrak itu dengan teori *Feminism Intersectionality*.

Konstruksi Politik

Konstruksi politik, dalam penelitian ini merupakan sebuah bentuk kerjanya kekuasaan dalam sifatnya yang dominatif dan

hegemoni. Konstruksi politik ini selanjutnya sering kali melibatkan elemen-elemen budaya termasuk bagaimana konstruksi ini bekerja dalam pembentukan citra bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap kebudayaan mempunyai citra terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Secara umum laki-laki dilihat sebagai individu yang memiliki power, lebih aktif serta ditandai dengan kebutuhan yang besar mencapai tujuan dominasi dan otonom. Berlawanan jika dihadapkan dengan perempuan yang dilihat sebagai individu yang relatif lemah, kurang aktif, lebih menaruh perhatian, dan mengalah. Budaya masyarakat banyak memaknai gender sebagai pembagian peran terhadap laki-laki serta perempuan, yang dimana secara anatomi sendiri laki-laki dan perempuan sendiri diciptakan berbeda namun memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama. Dalam perkembangan berdasarkan realita yang terjadi melihat bahwa ketimpangan kehidupan sosial membuat perempuan terpinggirkan dalam berbagai posisi termasuk juga hak partisipasi perempuan di ruang publik seperti forum.

Powerlessness

Menurut Melvin Seeman, *powerlessness* didefinisikan sebagai ketidakmampuan yang diakibatkan oleh individu itu sendiri ataupun diakibatkan oleh orang lain, dimana individu tersebut tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasinya. Seperti halnya perempuan Bali yang dimana sangat sulit untuk

mendobrak dominasi patriarki yang disebabkan oleh faktor individu seperti keterbatasan kemampuan yang dimiliki, maupun faktor di luar dari individu yang mempengaruhi seperti faktor kerabat yang menekan.

Dominasi Patriarki

Dominasi Patriarki menjadi struktur budaya yang kental di dalam kehidupan masyarakat daerah khususnya masyarakat Bali. Patriarki menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki untuk lebih tinggi dari pada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dominasi Patriarki berjalan sejak lama sebagai struktur budaya bagi masyarakat Indonesia khususnya Bali yang sudah berjalan sangat lama. Menimbulkan hegemoni dan menganggap bahwa dominasi patriarki menjadi suatu hal yang wajar bagi masyarakat terkhusus perempuan yang dianggap kewenangannya di bawah laki-laki.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini berupa metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki karakteristik untuk mengeksplorasi menggunakan lingkungan sebagai sumber data, dengan mengambil kejadian-kejadian sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan memahami bagaimana fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa ilmiah. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu Case

study research, dimana penelitian ini fokus terhadap spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu ataupun kelompok secara mendalam. Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu melihat konstruksi politik perempuan dalam proses pembentukan kebijakan *pararem* Desa Pakraman Megati Kelod Kabupaten Tabanan.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh. Data Primer merupakan sumber data yang didapat dari pihak pertama atau sumber utama. Data primer juga berupa subjek riset (penulis lain) baik secara individu maupun kelompok, sehingga dalam upaya pengumpulan data tersebut dengan melakukan rangkaian wawancara untuk mendapatkan data terkait konstruksi politik perempuan dalam proses pembentukan *pararem* Desa Pakraman Megati Kelod Kabupaten Tabanan. Sedangkan, data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya atau secara tidak langsung. Data sekunder termasuk kedalam data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis.

Penentuan Informan

Informan di dalam penelitian ini merupakan informan terpilih berdasarkan pertanyaan penulis baik secara lisan maupun tulisan, untuk mendukung temuan penelitian dalam mendukung teori *feminis intersectionality* penulis dalam pengambilan data akan melakukan *clustering* informan terhadap

aspek- aspek yang disebutkan di dalam *Intersectionality* yang memiliki spesifikasi sebagai berikut yaitu: (1) perempuan dalam kategori kelas, (2) perempuan dalam kategori ras, (3) perempuan dalam kategori gender, dan (4) pengurus adat. Clustering berdasarkan spesifikasi tertentu sebagai informan dibentuk guna mendapatkan informasi dengan beberapa latar belakang yang berbeda dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel. Cara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan tentu secara mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Sedangkan studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku yang memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari catatan, buku, surat kabar sebagai pendukung dalam penelitian mengenai konstruksi politik perempuan adat dalam proses pembentukan kebijakan di level adat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pakraman Megati Kelod

Desa Pakraman Megati Kelod yang terletak di Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 74 Ha. Dalam wilayahnya Desa Pakraman Megati Kelod membagi wilayahnya menjadi 2 bagian yaitu; Tempekan Bedajanan (utara) dan Tempekan Belodan (selatan) dengan jumlah penduduk yang tinggal secara keseluruhan sejumlah 800 jiwa yang di bagi menjadi 3 status kependudukannya yaitu sebagai krama adat, krama tamiu, dan tamiu. Status kependudukan di dalam wilayah Desa Pakraman Megati Kelod telah diatur dalam bentuk *awig-awig* dan diturunkan ke dalam *pararem*. Aturan ini diturunkan dalam bentuk *pararem* agar nantinya masyarakat dapat mengetahui lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat yang tinggal di dalam wilayah Desa Pakraman Megati Kelod. Pembentukan aturan-aturan yang berlaku baik itu *awig-awig* ataupun *pararem* tentunya diawali dengan *paruman* (rapat musyawarah) yang dihadiri oleh krama adat. Krama adat nantinya akan meninjau kembali rumusan *awig-awig* ataupun *pararem* secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Konstruksi Perempuan Desa Pakraman Megati Kelod Berdasarkan Kategori Kelas Pendapatan

Peranan perempuan tidak pernah terlepas dari aktivitasnya di berbagai sektor. Hal ini termasuk pula seiring perkembangan jaman sektor-sektor publik tidak hanya membatasi

golongan gender tertentu (laki-laki) melainkan juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beraktivitas di dalamnya. Begitu pula dengan kondisi perempuan di dalam sektor-sektor pekerjaan di publik. Berdasarkan kategori kelas pendapatan khususnya representasi kelas menengah, diperoleh wawancara dengan salah satu informan bernama Ibu Aga yang dalam aktivitasnya bergerak pada sektor publik sekaligus domestik sebagai ibu rumah tangga. Dalam penuturannya informan merepresentasikan aktivitas perempuan dalam tugas-tugas di sektor domestik sering kali berdampingan dan menjadi sebuah realitas yang melekat pada diri individu perempuan yang bersangkutan. Hal ini berlaku pula pada perempuan yang menjalankan perannya sebagai krama adat. Meskipun aktivitas perempuan selalu dihadapkan dengan tugas-tugas dari berbagai sektor namun tetap dapat disiasati dalam membagi waktu agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana. Ibu Aga menanggapi terkait peran perempuan dan menilai bahwa peran perempuan sangat penting dalam beberapa sektor sentral seperti halnya piodalan meski informan juga menyampaikan bahwa tidak dipungkiri keterlibatan laki-laki di dalam rangkaian upacara tersebut. Informan Ibu Aga menyampaikan juga tanggapan terkait dominasi laki-laki yang selama ini melekat dan kepentingan perempuan dalam keikutsertaan terhadap proses pembentukan *pararem* terutama membahas tentang

piodalan. Informan menyampaikan perlu adanya perwakilan di luar dari tokoh perempuan yang mengayomi seperti halnya ibu adat, namun dalam realisasinya masih kurang, ditambah faktor lain seperti tekanan dari sektor internal yang menjadikan sangat sedikit tokoh-tokoh perempuan yang berani untuk mengemukakan pemikiran mereka. Ibu Aga merupakan salah satu perempuan yang memiliki keinginan untuk bersuara namun dalam halnya yang sama informan merasa bahwa perempuan di Desa Pakraman Megati Kelod kurang untuk difasilitasi. Sebagai sektor utama di segala aktivitas adat, informan menilai bahwa adat belum dalam memfasilitasi perempuan untuk ikut ke dalam forum. Pada kesempatan yang sama perempuan memiliki posisi yang tawar terutama dalam kegiatan paruman. Hal ini terlebih pada saat posisi laki-laki mengalami halangan untuk menghadiri dan biasanya menitipkan aspirasinya kepada istri (perempuan). Pada akhirnya posisi perempuan sangat dilematik atas apa yang dirasakan dan keinginan untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan dalam dirinya akibat faktor lain yang memberikan tekanan-tekanan sosial terhadap individu terkait seperti sanksi akibat kekerabatan yang terjalin.

Selain dalam kategori kelas menengah, terdapat kategori kelas dengan profesi ibu rumah tangga dengan Ibu Bira sebagai informan yang merupakan perempuan krama adat di Desa Pakraman Megati Kelod.

Informan sendiri dalam aktivitas kesehariannya bergerak pada sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Perempuan Desa Pakraman Megati Kelod menghabiskan sebagian waktu mereka dalam melaksanakan aktivitas aktivitas tersebut. Terkait aktivitasnya sehari-hari meskipun informan aktivitasnya sebagai pekerja di dalam sektor domestik namun informan dalam pembagian tugasnya jika dibandingkan sektor domestik dikatakan bahwa lebih memprioritaskan kegiatan di ranah publik (adat). Perempuan sebagai pemegang sektor terpenting dalam aktivitas adat, kerap dianggap tidak memiliki nilai tawar dalam partisipasi sebagai salah satu aktor yang mewakili dalam pembentukan kebijakan, meskipun perempuan kerap memprioritaskan tugas-tugas yang menyangkut aktivitas adat. Ibu Bira menanggapi bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah adat bukan hanya sebagai pendukung saja, melainkan keterlibatan perempuan wajib dipertimbangkan sebagai yang utama dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ibu Bira menambahkan bahwa, meski peran perempuan dirasakan penting, namun bagi Ibu Bira mengakui bahwa sebagian besar perempuan masih terkendala dalam mengekspresikan pendapatnya di ruang publik, terutama dalam penyampaian aspirasi. Hanya saja dalam kendala ini ternyata perempuan masih bisa menyasati atau menegosiasikannya, terutama dengan menyampaikan kepada orang yang lebih

berani untuk berbicara dan atau ada orang lain yang bisa mewakili untuk bicara. Ternyata selama ini kendala untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik bukan sebuah pilihan tanpa alasan, namun karena hegemoni kekuasaan perempuan memilih untuk menghindari konflik. Ibu Bira menganggap peran perempuan penting dalam mengutarakan keresahan dan lebih condong untuk menyampaikan kepada perwakilan yang akan disampaikan di *Paruman Agung* tersebut. *Paruman Agung* lebih dipilih karena merupakan paruman besar yang membahas segala persoalan terkait dengan kepentingan desa setempat dibandingkan pertemuan-pertemuan lain, seperti *Paruman Pasutri Mangku*, paruman-paruman kecil lain yang dianggap tidak memiliki nilai strategis. Dalam medianya seperti *Paruman Pasutri Mangku* dengan jumlah orang yang lebih sedikit sehingga lebih berani untuk mengutarakan atau merundingkan dimana yang dirasa kurang cocok ditampung kemudian disampaikan di *Paruman Agung*. Karena seperti informan ini cenderung malu untuk berbicara di depan publik.

Konstruksi Perempuan Desa Pakraman Megati Kelod Berdasarkan Kategori Ras

Dalam analisis ini, penulis juga menampilkan aspek penting dalam teori interseksionalitas yaitu aspek ras. Aspek ras pada penelitian ini mencakup karakteristik perempuan yang tidak berasal asli dari semeton (saudara) desa adat yang bersangkutan. Ibu Aby

sebagai Informan merupakan orang Jawa yang sudah menikah dengan penduduk desa adat setempat sehingga memiliki hak yang sama sebagai warga desa adat. Terkait dalam aktivitasnya sehari-hari kegiatan di dalam sektor domestik dengan publik dikatakan bahwa lebih memprioritaskan kegiatan dalam ranah publik (adat) dan mengefisienkan waktu dalam Pembagian tugas. Informan juga memberikan tanggapan terkait peran perempuan dan menilai bahwa peran perempuan sangat dibutuhkan atas keahlian yang dimiliki perempuan. Menurut informan keterlibatan perempuan di dalam ranah pembentukan kebijakan perlu dilibatkan, terlebih dalam hasil kebijakan tersebut yang nantinya juga akan melibatkan perempuan, tidak hanya dominasi laki-laki dalam proses pembentukannya terlebih dalam pembahasan terkait piodalan yang dimana ini sebagian besar pelaksanaannya didominasi oleh perempuan dan keterlibatan perempuan tentunya menjadi mutlak terhadap kebijakan di dalam halnya prosesi upacara piodalan. Ibu Aby juga menyampaikan bahwa Prajuru Desa Pakraman Megati Kelod sebenarnya memfasilitasi perempuan dalam menyampaikan kritikan dan sarannya melalui forum resmi namun tidak secara mutlak dalam halnya seperti paruman, dalam hal ini Ibu Aby merasa difasilitasi namun tidak di dalam forum resmi dan ini sifatnya situasional. Informan menjelaskan bagaimana adaptasi yang dilakukan untuk bisa berbaur dengan masyarakat setempat,

serta mengikuti adat istiadat yang berlaku. Informan beranggapan bahwa perempuan dengan kebudayaan Bali dianggap sulit mengingat aktivitasnya di sektor domestik maupun publik (adat) kerap kali dijalani secara bersamaan. Meski informan dengan latar belakang yang berbeda sebelumnya, tidak membuat informan merasa terdiskriminasi dan justru cenderung berani dalam menyampaikan pendapat dan saran atas kebijakan yang dirasa kurang sesuai terlebih melewati dari batas kemampuan informan.

Selain representasi Ras dari Informan perempuan yang tidak berasal asli dari Bali, juga terdapat informan bernama Ibu Sagung yang merupakan perempuan krama adat di Desa Pakraman Megati Kelod Kabupaten Tabanan yang berdomisili di Kota Denpasar. Informan sendiri dalam aktivitas kesehariannya bergerak pada sektor publik sebagai pelayan dan perantara umat hindu kepada sang pencipta (istri mangku). Selain di sektor publik informan juga dalam aktivitasnya bergerak pada sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Dalam penuturannya Ibu Sagung merepresentasikan peranan perempuan dalam aktivitas adat yang menyita sebagian besar waktu dan tenaga dalam menjalankan aktivitasnya di sektor domestik dan publik (adat) yang kerap kali pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan. Informan mengefisiensikan waktunya dalam menjalankan tanggung jawab di sektor domestik terlebih jika tugas-tugas tersebut dijalankan bersamaan.

Informan menganggap bahwa sektor domestik dirasa penting mengingat kebutuhan keluarga menjadi prioritas. Keterlibatan informan dalam aktivitas adatnya cukup besar mengingat informan merupakan salah satu perempuan yang diberikan kepercayaan untuk ikut terlibat dalam perkembangan pembangunan desa. Informan menyebutkan pihaknya sering berdiskusi dengan lembaga adat meskipun diskusi ini tidak terjadi di dalam forum besar melainkan secara personal. Informan juga menyampaikan diskusi ini juga menjadi masukan untuk perencanaan kegiatan maupun yang sudah terlaksana. Mengingat informan yang sebelumnya merupakan wanita karir dan tinggal di Denpasar. Diskusi ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di kota dan mencoba hal-hal yang bisa diadaptasi untuk perkembangan di desa adat. Adanya kepercayaan terhadap informan untuk menyampaikan aspirasi dan mewakili perempuan yang memiliki masukan terhadap kebijakan yang dirasa tidak sesuai, meskipun informan terkait bukan perempuan yang menjalani sebagian aktivitas kesehariannya di Desa Megati. Pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pembentukan kebijakan khususnya secara formal dan bukan hanya menjadi sektor pendukung atas kebijakan yang dibentuk oleh dominasi laki-laki. Perempuan seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki, sehingga harapannya kebijakan yang dikeluarkan

mampu membangun kemajuan bagi Desa Pakraman Megati Kelod.

Konstruksi Perempuan Desa Pakraman Megati Kelod dalam Kategori Gender

Ibu Krisna sebagai salah satu Informan dalam kategori gender merupakan perempuan krama adat di Desa Pakraman Megati Kelod. Informan sendiri dalam aktivitas kesehariannya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam penuturannya Informan merepresentasikan terkait peranan perempuan dalam statusnya sebagai sebagai kepala rumah tangga dalam aktivitas adat. Dalam halnya aktivitas perempuan di dalam sektor domestik dengan publik sering kali terjadi secara bersamaan. Perempuan kerap dipaksa dan mengutamakan salah satu sektor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Ibu Krisna selaku informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dalam menjalankan aktivitasnya, sektor public (adat) menjadi suatu prioritas bagi informan. Informan menilai tugas-tugas dan tanggung jawab dalam aktivitas adat lebih penting dan menganggap tugas-tugas di sektor domestik (rumah tangga) sebagai tugas yang sifatnya situasional. Informan turut memberikan tanggapan terkait peran perempuan terkhusus di dalam aktivitas adat. Informan menilai bahwa perempuan berperan di setiap aktivitas adat yang tidak hanya bergerak sebagai sektor pendukung, namun menjadi sektor utama dalam beberapa aktivitasnya seperti membuat banten, memasak, bikin

kopi dimana pekerjaan ini selalu melibatkan perempuan. Realitasnya meskipun aktivitas adat di dominasi oleh perempuan namun di dalam forum kekuasaan laki-laki sangat mendominasi terutama forum-forum seperti *Paruman Agung*. Meski begitu tidak menyurutkan Ibu Krisna untuk memberikan masukan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di internal desa seperti masalah kebersihan dan memang paham akan permasalahannya, akan tetapi jika permasalahan yang terjadi diluar dari batas kompetensi, informan cenderung untuk tidak berkomentar. Ibu Krisna sebagai informan menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan di dalam suatu forum (paruman) itu sangat penting, meski informan hadir dalam statusnya sebagai kepala keluarga. Namun informan tetap mendukung keterlibatan perempuan yang dianggap dapat memberikan masukan dari perspektif lainnya dan juga menambah kepercayaan diri bagi informan karena dirasa mendapatkan dukungan atas kehadiran perempuan lainnya di dalam forum. Informan juga menambahkan, perlu adanya fasilitas dari lembaga adat dan mengikutsertakan perempuan secara resmi walaupun untuk saat ini untuk paruman sendiri adat memperbolehkan istri (perempuan) hadir namun konteksnya secara tidak resmi atau hanya mewakili keluarga.

Selain Ibu Krisna, terdapat Informan lain untuk kategori gender yakni Ibu Kompyang dimana Informan merupakan perempuan krama adat di Desa Pakraman Megati Kelod

Kabupaten Tabanan. Informan sendiri dalam aktivitas kesehariannya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam penuturannya Informan merepresentasikan perempuan yang tidak pernah terlepas dari peranan dalam aktivitasnya di berbagai sektor. Baik sektor domestik dan publik yang bahkan di beberapa tugas dan kesempatan perempuan menjadi tonggak utama dalam berjalannya aktivitas seperti mengurus rumah tangga, membuat banten dalam prosesi upacara agama di adat, dan bahkan aktivitas sebagai pelaku dalam menunjang perekonomian di dalam rumah tangga. Ibu Kompyang selaku informan yang memiliki aktivitas yang dijalani sebagai perempuan yang mengurus sektor domestik dan pelaku salah satu penunjang perekonomian keluarga. Informan dalam kaitannya aktivitas di sektor domestik dan aktivitas di sektor publik (adat) informan lebih memprioritaskan waktunya di dalam aktivitas dan tugas-tugasnya di adat. Peranan perempuan menjadi bagian aktivitas penting terutama dalam aktivitas adat yang selalu melekat di tiap masing-masing individu khususnya perempuan yang telah menjadi bagian dari krama adat. Namun jika partisipasi perempuan dalam ranah forum seperti paruman, informan menilai bahwa urgensi keterlibatan perempuan di dalam forum akan penting jika dalam pembahasannya hanya yang menjadi tugas-tugas penting yang menyangkut mayoritas kelompok perempuan seperti kegiatan kelompok PKK. Informan menilai jika ranahnya diluar dari konteks perempuan,

maka bukan menjadi wewenang perempuan meskipun perempuan juga terlibat dalam aktivitasnya. Informan dalam hal partisipasi di dalam sebuah forum kurang berani dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terkait hal yang dirasa kurang cocok. Dari penuturan informan, dikatakan bahwa informan pernah menghadiri paruman sebagai perwakilan istri kelompok regu. Regu yang dimaksud disini merupakan pengelompokan krama adat berdasarkan wilayah tempat tinggal krama adat yang dibagi oleh desa adat. Difungsikan sebagai kelompok agar memudahkan untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut aktivitas di adat.

Analisa Hasil Temuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, penulis mendapatkan temuan bahwa adanya persamaan dan perbedaan pendapat antara 3 kategori yang terkait dengan konstruksi politik perempuan dalam proses pembentukan *pararem* Desa Pakraman Megati Kelod berdasarkan bentuk-bentuk *Intersectionality*. Pada akhirnya penulis menemukan fakta bahwa informan dalam kategori kelas, ras, dan gender, sepakat bahwa peranan perempuan perlu dilibatkan dalam setiap aktivitas adat. Peneliti menilai berdasarkan penuturan informan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam aktivitas adat yang sulit untuk digantikan. Meski peranan perempuan memiliki posisi strategis, namun di dalam ranah publik seperti paruman hanya beberapa perempuan yang mampu menempatkan dirinya dalam posisi strategis.

Tentunya bukan tanpa alasan, melainkan terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi. Informan dalam kategori kelas mengutarakan bahwa faktor-faktor tersebut datang dari ruang lingkup terkecil seperti, keluarga yang menekan untuk tidak terlibat lebih jauh di dalam forum. Kurangnya fasilitas terhadap perempuan dalam menyampaikan aspirasi di ranah forum sehingga menyebabkan kepercayaan diri perempuan dalam menyampaikan aspirasi berkurang. Sama halnya dengan informan perempuan dalam kategori gender yang merepresentasikan perannya sebagai kepala rumah tangga dalam aktivitas adat juga berpendapat bahwa, perempuan dalam partisipasinya di kegiatan adat hanya berani berperan dalam ranah yang mereka kuasai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan perempuan itu sendiri. Diluar dari aktivitas keseharian mereka, perempuan cenderung untuk menuruti bagaimana berjalannya aturan yang dibentuk oleh dominasi laki-laki. Namun, sebaliknya dengan bentuk *Intersectionality* pada kategori ras, peneliti menemukan fakta bahwa informan dalam kategori ini dalam ranah publik. Apabila dalam ruang paruman terdapat suatu hal yang dirasa memberatkan, kedua informan tersebut tidak ragu dalam menyampaikan aspirasi yang dimilikinya atas apa yang dirasa tidak sesuai menurut kedua informan. Peneliti melihat informan dalam kategori ras memiliki posisi tersendiri dalam menempatkan dirinya di ruang publik. Seperti Ibu Sagung yang memiliki posisi tersendiri

dalam keterlibatannya di ruang publik khususnya paruman adat dalam membantu menganalisis anggaran dana pembangunan balai desa. Sama dengan Ibu Aby meskipun bukan merupakan perempuan Bali Asli namun mampu menempatkan diri dalam interaksi sosial di dalam masyarakat desa adat, sehingga berani dalam menyampaikan aspirasi yang dimiliki di ruang publik (paruman). Dalam analisis peneliti, perempuan sebenarnya mampu memiliki posisi strategis di ruang publik khususnya paruman. Tergantung bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dan interaksi sosial yang dilakukan di tengah masyarakat desa tersebut. Namun pada akhirnya tidak semua perempuan memiliki kemampuan, kondisi, dan kesempatan yang sama seperti informan pada kategori ras. Dari fakta terkait, konsepsi *Intersectionality* peneliti menyimpulkan bahwa perempuan Desa Pakraman Megati Kelod memiliki keinginan untuk mendobrak dominasi patriarki ini dalam posisi mereka sebagai perempuan yang memiliki posisi strategis. Namun meski mereka memiliki posisi strategis dalam aktivitas adat, pada akhirnya posisi mereka sebagai perempuan masih suboptimal. Perempuan belum mampu merubah struktur atas dominasi patriarki yang selama ini melekat khususnya pada perempuan sebagai krama adat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan

bahwa perempuan Desa Pakraman Megati Kelod merespon bagaimana keinginan mereka untuk masuk ke dalam ruang publik. Ini di buktikan dari bagaimana kritikan- kritikan atau saran yang coba di lontarkan dalam beberapa aturan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka mencoba untuk menyampaikan kritikan atau saran tersebut dalam berbagai cara, mengingat patriarki bekerja dalam kekuasaan yang hegemoni dan dominatif menjadikan mereka sulit untuk masuk dengan bebas ke dalam ruang publik (paruman). *Feminis Intersectionality* melihat keterlibatan perempuan untuk masuk lebih jauh kedalam forum yang didominasi oleh laki-laki masih sangat terbatas. Peranan perempuan di Desa Pakraman Megati Kelod dalam proses pembentukan perarem pun dinilai masih sangat suboptimal. Meski keinginan perempuan dalam menyampaikan aspirasi mereka tinggi, pada akhirnya ini akan terhalang oleh faktor-faktor lain yang menghambat seperti kondisi sosial yang tidak mendukung, keberanian dalam mengemukakan pendapat di dalam forum, dan sejauh mana kapasitas yang dikuasai. *Feminis Intersectionality* melihat faktor-faktor tersebut sebagai suatu bentuk penindasan yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang berdampak terhadap ketidakadilan yang sistematis. Hanya ada sedikit perempuan yang mampu mendobrak penindasan dan ketidakberdayaan terhadap perempuan, sehingga menempatkan mereka pada posisi strategis di ruang publik (paruman). Tentunya ini tidak terlepas dari

bagaimana kondisi sosial yang dihadapi, kemampuan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, dan keberanian dalam mengemukakan pendapat di ruang publik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Crenshaw, K. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. University of Chicago Legal Forum.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Maswinara, I. W. 2006. *Sistem Filsafat Hindu (Sarva Darsana Samgraha)*. 2nd Paramita. Surabaya.
- Nawawi, H. 2005. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.

Jurnal

- Cho, S. 2013. POST-INTERSECTIONALITY: The Curious Reception of Intersectionality in Legal Scholarship. *Du Bois Review: Social Science Research on Race*. 10(2): 385-404.
- Firdaus, M. 2021. Fenomena Ruang Domestik Publik Perempuan Bali: Studi Fenomenologi Feminisme di Bali. *Commercium*. 4(2): 161-171.

- Gelgel, N. M. R. A. 2016. Perempuan Gianyar dan Belunggu Ranah Publik dan Privat. *Jurnal Kajian Bali*. 6(1): 173-210.
- Kwan, P. 1996. Jeffrey Dahmer and the cosynthesis of categories. *Hastings LJ*. 48(6): 1257-1292.
- Rakoczy, S. 2004. Religion and violence: the suffering of women. *Agenda*. 18(61): 29-35.
- Saraswati, N. L. A. C., M. D. Lestari. 2020. Peran dan Resiliensi Pada Perempuan Balu. *Jurnal Psikologi Udayan*. Edisi Khusus: 99-111.
- Sari, H. P. 2005. Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. *Indonesian Journal of Criminology*.4(1): 9-10
- Seeman, M. 1982. On The Meaning of Alienation. *American Sociological Association*. 24(6):783-91.
- Sudarta, W. 2006. Pola Pengambilan Keputusan Suami Istri Rumah Tangga Petani Pada Berbagai Bidang Kehidupan. *Kembang Rampai Perempuan Bali*.5(2): 65-83.
- Widayani, D. M. N., dan S. Hartani. 2014. Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*. 13(2): 149-162.

Artikel

- Tabelak, D. 2018. Budaya Patriarki Jadi Pemicu Tingginya Kekerasan Perempuan di Bali. <https://radarwali.jawapos.com/bali/denpasarbadung/01/12/2018/budayapatriarki-jadi-pemicu-tingginya-kekerasan-perempuan-di-bali/>. 10 Januari 2022 (12:10)